



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
INTISARI.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Pustaka Mengenai Kerapatan Adat Nagari.....	17
1. Pengertian Kerapatan Adat Nagari.....	17
2. Tugas dan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari	18
3. Struktur Kelembagaan Kerapatan Adat Nagari.....	19
B. Tinjauan Pustaka Mengenai Nagari	20
C. Tinjauan Pustaka Mengenai Desa, Desa Adat, dan Kelurahan.....	22
D. Landasan Teori.....	28
1. Pluralisme Hukum.....	28
2. Customary Law dan Adat Law.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Sifat Penelitian	37
C. Data Penelitian	38
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	40
E. Jalannya Penelitian.....	43
F. Lokasi dan Subjek Penelitian	43



G. Analisis Hasil Penelitian	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kota Padang	48
1. Gambaran Umum Mengenai Kota Padang	48
a. Profil Kota Padang	48
b. Sejarah Wilayah Kota Padang	50
c. Kedudukan Wilayah Adat di Kota Padang	52
2. Gambaran Umum Mengenai Kerapatan Adat Nagari di Kota Padang	54
a. Gambaran Umum Mengenai Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah.....	54
b. Gambaran Umum Mengenai Kerapatan Adat Lubuk Kilangan	57
c. Gambaran Umum Mengenai Kerapatan Adat Niniak Mamak Nan Salapan.....	60
3. Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Dinamika Peraturan Perundang-Undangan	63
4. Kedudukan Kerapatan Adat Nagari dalam Sistem Pemerintahan di Kota Padang	74
a. Tugas dan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kota Padang	74
b. Implementasi Kewenangan Kerapatan Adat Nagari di Kota Padang	85
B. Interaksi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan Lembaga Pemerintahan Formal Di Kota Padang	90
1. Pola Hubungan Kerapatan Adat Nagari	90
a. Kerapatan Adat Nagari dengan Kelurahan dan Kecamatan	92
b. Kerapatan Adat Nagari dengan Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	98
2. Dimensi Batas Kewenangan dalam Relasi Kerapatan Adat Nagari dan Pemerintah.....	104
C. Prospek Eksistensi Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kota Padang di Masa Mendatang.....	115
1. Tantangan Yang Di Hadapi Oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Kota Padang	115
a. Krisis Generasi Penerus	116
b. Miskonsepsi Dasar Pendirian Kerapatan Adat Nagari oleh Pemerintah	119
c. Konflik Kepentingan dan Dualisme KAN.....	120
d. Belum Adanya Landasan Hukum Yang Kuat Untuk Penyelenggaraan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kota Padang	122



e. Keputusan Yang Dihasilkan Oleh Kerapatan Adat Nagari Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat	124
2. Urgensi Eksistensi Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kota Padang dan Prospek Keberlanjutannya di Masa Yang Akan Datang	126
BAB V PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	139